



**DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 10
KABUPATEN JEMBER**

The Impact Of Teacher Certification Policies In SMPN 10 District Jember

SKRIPSI

Oleh

**Rizky Kurnia Putra
NIM 090910201092**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 10
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Rizky Kurnia Putra
090910201092

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Toto Tjahjono dan Ibunda Widji Setijaningsih, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi untuk tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, selalu mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik.
2. Semua guru-guru sejak saya mengenal bangku sekolah, mulai TK Al-Furqan Jember, SD Al-Furqan Jember, SMPN 1 Jember, SMAN 5 Jember, dan dosen-dosen Universitas Jember serta semua guru di luar bangku sekolah yang telah berbagi ilmu pengetahuan sebagai bekal merangkai kehidupan supaya bermanfaat bagi sesama.
3. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?”

(QS. Al An'am 32)

“Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.”

(QS. Al Ankabut 64)

“Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu.”

(QS. Muhammad 36)

“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan palsu.”

(QS. Al Hadid 20)

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.”

(HR Muslim)

“Didalam kehidupan ini kita harus bisa melihat suatu hal lebih dalam dari yang terdalam dan dapat melihat sesuatu dalam banyak sudut pandang yang lebih luas”

(Anonim/Unknown)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Kurnia Putra

NIM : 090910201092

Menyatakan dengansesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*dampak kebijakan sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan.Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2016

Yang menyatakan

Rizky Kurnia Putra

NIM 090910201092

SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 10
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Rizky Kurnia Putra
NIM 090910201092**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM

Dosen Pembimbing Pendamping : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

RINGKASAN

Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember; Rizky Kurnia Putra, 090910201092; 2015: 73 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sertifikasi guru SMPN 10 di Kabupaten Jember. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Melalui sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu pendidikan minimal S-1 (Strata satu)/D-4 (Diploma empat) dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Misalnya perilaku informan, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karena menggunakan metode penelitian kualitatif, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-positivist*, khususnya *critical theory*.

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan mengenai dampak sertifikasi guru di SMPN 10 Jember dampak sertifikasi terhadap guru memiliki dampak positif dan negatif.



PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayah-Nya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “dampak kebijakan sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyud iS.Sos, MM. dan Bapak Drs Moeroe Supranoto M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.
4. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan selalu dengan sabar membimbing sembari memotivasi sehingga pembuatan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan membantu saya dalam memperkuat pemahaman saya terhadap skripsi ini.
6. Bapak Moelyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara yang selalu dengan kesabarannya melayani kebutuhan administratif mahasiswa.

7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Kedua Orang tua Toto Tjahjono dan Widji Setijaningsih yang selama ini telah memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Yang tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun juga.
9. Sahabat dan teman-teman yang telah mewarnai kehidupan saya selama berada di kampus Mohammad Baladdudin Dayar, Ade Cahyoko, Muhammad Misbahul Ulum, Bahtiar Nur Rahman, April Rio Efendi serta teman-teman Administrasi Negara angkatan 2009 yang menjadi teman dalam menimba ilmu dan berpetualang Ada hikmah yang bisa saya ambil dalam perjalanan ini.
10. Saudara, sahabat dan teman saya yang telah membantu selama dalam proses perkuliahan serta skripsi Prayogi Warekadianto, Windy Narendra, Yongki Meryo, Rayhan Sahar. Terima kasih atas bantuan yang pernah diberikan.
11. Bapak kepala sekolah SMPN 10 Jember H. Didiék Triyanto R. S.Pd, M.Pd yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di sekolah tersebut, Bapak wakil kepala sekolah Syaifudin M.Pd beserta bapak Wahyu April, M.Pd yang telah memperlancar dan membantu proses penelitian skripsi saya.
12. Kantor Dinas Pendidikan yang telah membantu dan memperlancar dalam memberikan data penelitian skripsi saya

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 20 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vi - viii
PRAKATA	ix - x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Konsep Kebijakan Publik	20
2.2 Evaluasi Kebijakan	21
2.2.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan	23
2.2.2 Pendekatan terhadap Evaluasi Kebijakan	24
2.2.3 Tipe Evaluasi Program	24
2.2.4 Jenis Evaluasi Program	26
2.3 Konsep Sertifikasi Guru	27

2.3.1 Mutu Pendidikan	31
2.4 Kerangka Berpikir	41
BAB 3. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian	44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.4 Sumber Data	45
3.5 Teknik Pemilihan Informan	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6.1 Wawancara Mendalam	47
3.6.2 Observasi	48
3.6.3 Rekaman arsip	49
3.7 Keabsahan Data	49
3.8 Validitas Data	51
3.8.1 Triangulasi data	51
3.8.2 Triangulasi Sumber	52
3.9 Metode Analisis Data	52
3.9.1 Reduksi Data	53
3.9.2 Penyajian Data	54
3.9.3 Penarikan Kesimpulan	54
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Profil SMPN 10 Kabupaten Jember	55
4.2 Sertifikasi Guru di SMPN 10 Jember	56
4.3 Dampak Sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember	59
4.3.1 Dampak Positif	60
4.3.2 Dampak Negatif	66
BAB 5. PENUTUP	72

5.1 Kesimpulan 72

5.2 Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

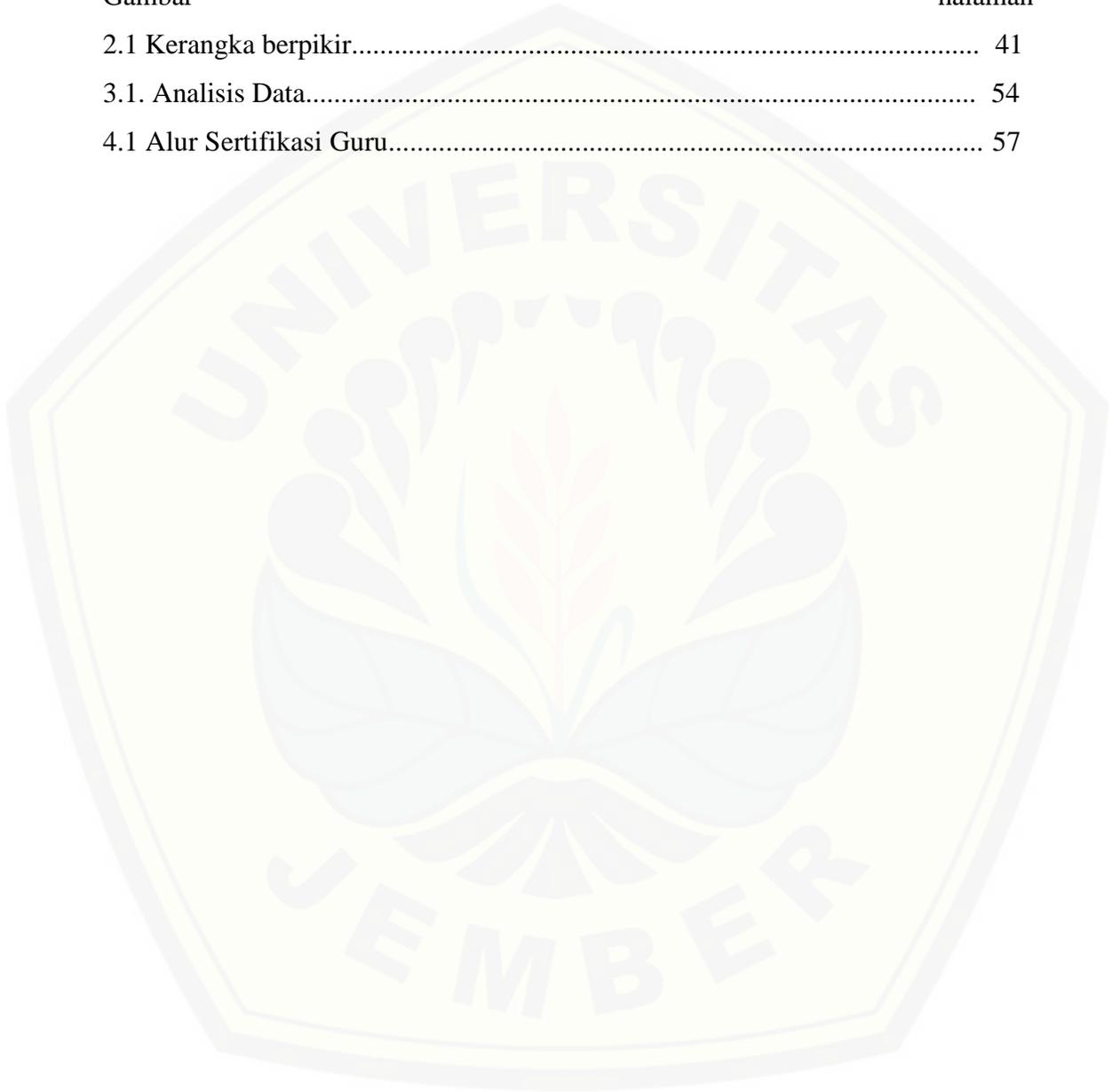


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Fenomena Mutu Pendidikan di Indonesia.....	5
1.2 Rekapitulasi Kelulusan SMPN Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.....	14
1.3 Jumlah Guru Yang Dapat Sertifikasi Dan Yang Belum Sertifikasi Di SMPN Wilayah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.....	16
3.1. Penelitian Kualitatif sebagai Proses.....	51
4.1 Jumlah Guru Yang Dapat Sertifikasi Dan Yang Belum Sertifikasi Di SMPN 10 Kabupaten Jember.....	59
4.2 Hasil Ujian Nasional SMPN 10 Jember.....	69
4.3 Prestasi Non Akademik Siswa SMPN 10 Jember.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka berpikir.....	41
3.1. Analisis Data.....	54
4.1 Alur Sertifikasi Guru.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN B. DOKUMENTASI FOTO

LAMPIRAN C. DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SMPN 10 JEMBER

LAMPRIAN D. DATA GURU TIDAK TETAP SMPN 10 JEMBER

LAMPIRAN E. PROFIL SEKOLAH

LAMPIRAN F. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

LAMPIRAN G. DAFTAR PRESTASI SEKOLAH

LAMPIRAN H. DAFTAR GAJI GURU

LAMPIRAN I. DATA REKAPITULASI UJIAN NASIONAL SMPN 10
JEMBER

LAMPIRAN J. DATA REKAPITULASI SMP NEGERI KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN K. DATA JUMLAH GURU YANG DAPAT
SERTIFIKASI DAN BELUM SERTIFIKASI DI SMP
NEGERI WILAYAH KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan bangsa yang semakin krusial dan multidimensional pada hampir semua sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akar masalah dari ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut adalah rendahnya efektivitas pembangunan sumber daya manusia yang selama ini diupayakan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tergolong rendah. Argumen ini dibuktikan dengan skor dan peringkat *Human Development Index* (HDI).

HDI adalah adalah pengukuran dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. HDI juga dapat digunakan sebagai Indikator dalam mengukur dan mengklasifikasi tingkat kemajuan suatu negara. Kualitas SDM Indonesia masih tergolong rendah. Apabila bangsa Indonesia ingin berkembang menjadi maju dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka cara utama yang harus dilakukan adalah membangun kualitas SDM secara optimal. Kunandar (2007:8) menyatakan bahwa hanya dengan kualitas SDM yang tinggi persoalan-persoalan bangsa Indonesia setahap demi setahap dapat terselesaikan. Dalam usaha pembangunan, sumber daya manusia adalah penggerak, pengolah dan pengatur sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, investasi di bidang SDM untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas mutlak diperlukan demi penyelesaian masalah bangsa dan tercapainya tujuan nasional.

Investasi SDM adalah semua cara atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Cara utama yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Menurut UURI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Pendidikan adalah suatu kegiatan sadar-sistematis untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan merupakan variabel yang sangat penting. Kunandar (2007:8) “menilai kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan di bidang pendidikan.” Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi positif antara mutu pendidikan terhadap kualitas SDM suatu bangsa. Jalal *et al.* (2009:5) menyatakan tentang relevansi positif antara mutu pendidikan terhadap daya saing suatu negara. Berdasarkan data-data dan relevansi–relevansi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses.

Proses pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAKEM yang efektif. *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap

di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Sowiyah, 2010:24).

Berdasarkan uraian disampaikan sebelumnya bahwa pendidikan adalah suatu proses, maka untuk menilai mutu pendidikan perlu menganalisa output dari proses tersebut. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat diketahui dengan menganalisa kemampuan peserta didik. Kemampuan anak didik di Indonesia, akan kalah bersaing dengan bangsa lain jika tidak dilakukan terobosan terhadap apa yang dideskripsikan tersebut. Oleh karena itu, perlu dianalisa penyebab rendahnya kemampuan siswa di Indonesia. Usman (2010:9) juga menyatakan bahwa “proses belajar- mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.”

Pokok pikiran dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa guru berkualitas akan menghasilkan siswa yang berkualitas. Hal ini menunjukkan adanya relevansi positif antara kualitas guru dengan kualitas siswa yang didiknya. Rendahnya prestasi atau kemampuan siswa di Indonesia mencerminkan kualitas guru yang rendah, sehingga menyebabkan rendahnya standar pengajaran dan pada akhirnya mengakibatkan gagalnya sistem pengajaran di Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini juga dapat disimpulkan betapa strategis dan pentingnya peran guru dalam meningkatkan kemampuan siswa melalui proses belajar-mengajar. Usman (2010) menegaskan “guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya

pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan.”

Di Indonesia, tuntutan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berazaskan “*good governance*” semakin menguat, terutama setelah bergulirnya era reformasi tahun 1998. Karakteristik kebijakan pembangunan sektor pendidikan yang lama cenderung menekankan dominasi peran pemerintah pusat dalam pengaturan pendidikan, kebijakan seperti ini berakibat pada penyeragaman dan pemusatan pengelolaan pendidikan yang berdampak pada lemahnya aktualisasi kapasitas pendidikan. Prinsip *good governance* menekankan pada akuntabilitas publik. Secara konseptual kebijakan tersebut memberikan ‘angin segar’ dan harapan yang optimistik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati, terutama terkait dengan dampak perubahan status tersebut yang kenyataannya menyisakan banyak persoalan terkait dengan struktur organisasi, manajemen, rekrutmen mahasiswa dan urusan finansial.

Hasil penelitian *United Nation Development Programe* (UNDP) pada tahun 2007 tentang Indeks Pengembangan Manusia menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 177 negara yang diteliti (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY=, diakses 7 Desember 2015). Indonesia memperoleh indeks 0,728. Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam penelitian berada pada peringkat ke-7 dari sembilan negara ASEAN. Salah satu unsur utama dalam penentuan komposit Indeks Pengembangan Manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah.

Keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia juga dinyatakan oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus bidang pendidikan. Menurut Badan PBB itu, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan pada tahun 2007 adalah 62 di antara 130 negara di dunia. *Education Development Index* (EDI) Indonesia adalah 0,935, di bawah Malaysia (0,945) dan Brunei Darussalam (0.965).

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari daya saing di tingkat internasional. Daya saing Indonesia menurut *World Economic Forum* tahun 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999) (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY=, diakses 7 Desember 2015).

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), mutu pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia (Lp3ipusat.Wordpress.Com).

Hasil penelitian dan survey tentang pendidikan tersebut menunjukkan adanya mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Beberapa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum. Permasalahan mengenai mutu pendidikan dijelaskan Tabel 1.1 .

Tabel 1.1 Fenomena Mutu Pendidikan di Indonesia

Permasalahan Mutu	Inti Permasalahan
Efektifitas pendidikan	Standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjang terhadap standar dan kompetensi.
Mutu dan gaji guru	Kesejahteraan guru yang masih belum terjamin dan mampu memenuhi kebutuhan guru
Profesionalisme guru	1. Program pendidikan kurang memberikan penekanan terhadap program pembentukan kemampuan dan sikap profesional guru 2. Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya
Biaya pendidikan	Biaya pendidikan tergolong masih tinggi dan masih banyak yang belum terjangkau

Sumber:<http://www.umm.ac.id/id/detail-328-permasalahan-pendidikan-di-Indonesia-opini-umm.html>

Penyebab rendahnya kemampuan siswa di Indonesia dikarenakan beberapa penyebab menurut Usman (2010:9) juga menyatakan bahwa “proses belajar-mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal

Guru berkualitas akan menghasilkan siswa yang berkualitas. Hal ini menunjukkan adanya relevansi positif antara kualitas guru dengan kualitas siswa yang didiknya. Rendahnya prestasi atau kemampuan siswa di Indonesia mencerminkan kualitas guru yang rendah, sehingga menyebabkan rendahnya standar pengajaran dan pada akhirnya mengakibatkan gagalnya sistem pengajaran di Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini juga dapat disimpulkan betapa strategis dan pentingnya peran guru dalam meningkatkan kemampuan siswa melalui proses belajar-mengajar.

Kunandar (2007:40) menyatakan bahwa “salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, nampaknya harus benar-benar memiliki kemampuan dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik siswanya agar berkualitas. Oleh karena guru di bidang kependidikan, agar dapat meningkatkan prestasi kerja kependidikannya yaitu kualitas anak didik, baik dari segi psikis maupun mental spiritual. Terbentuknya kemampuan dan sikap profesional guru-guru memang tidak mudah, belum tentu terbentuknya kemampuan profesional guru akan sekaligus terbentuk pula sikap profesionalnya, karena banyak faktor yang menentukannya. Meskipun guru telah terdidik di bidang kependidikan, belum tentu secara otomatis terbentuk juga kemampuan dan sikap profesional ini. Karena program pendidikan dipelajari kemungkinan tidak atau kurang memberikan penekanan terhadap program pembentukan kemampuan dan sikap profesional ini.

Adanya kenyataan bahwa mutu pendidikan Indonesia tergolong rendah, maka pascagerakan reformasi timbul tuntutan untuk melakukan perbaikan fundamental dalam sektor pendidikan. Perbaikan fundamental tersebut menjadi sulit untuk dilakukan mengingat UUDRI 1945 Pasal 31 dianggap tidak lagi memadai untuk melakukan perbaikan, reformasi dan modernisasi pendidikan Indonesia. Berikut ini Pasal 31 UUD RI 1945 sebelum diamandemen.

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia melalui wakilnya di parlemen pada 10 Agustus 2002 mengesahkan amandemen/perubahan UUD RI 1945 yang keempat, termasuk pasal 31, menjadi sebagai berikut.

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amandemen tersebut memberi implikasi antara lain sebagai berikut. Pendidikan (dasar) tidak lagi dipandang sebagai hak warga negara, tetapi merupakan kewajiban, di mana pelaksanaannya dibiayai oleh pemerintah.

Pemerintah perlu merancang dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- a. Adanya kenaikan dan penjaminan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan. Hal ini merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan perbaikan kualitas sistem pendidikan.
- b. Adanya penghargaan terhadap pengembangan IPTEK yang merupakan tuntutan globalisasi dan modernisasi.

- c. Amandemen tersebut, diharapkan dapat menjadi modal, landasan dan enabler bagi reformasi, perbaikan dan modernisasi pendidikan di Indonesia, termasuk perbaikan mutu tenaga kependidikan (guru).

Akar masalah dari rendahnya mutu dan gaji guru di Indonesia adalah pendefinisian terhadap profesi guru. Guru didefinisikan melalui kebijakan publik berupa undang-undang. UURI No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru (tenaga kependidikan) adalah “anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.” Definisi ini mencerminkan bahwa guru adalah sebuah profesi pengabdian yang bersifat suka rela, sehingga standar mutu tidak terlalu ditekankan. Kondisi ini mengakibatkan kurang terjaminnya mutu dan akhirnya kesejahteraan guru di Indonesia.

Jika seorang guru telah memenuhi standar mutu profesional yang meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, maka guru tersebut dianggap sebagai guru yang professional. Pengakuan atas profesionalitas tersebut dibuktikan dengan diberikannya sertifikat pendidik bagi guru yang bersangkutan. Adapun pasal yang mendasari akan dijelaskan sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa “sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.”

Pasal 11 ayat (1) “sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.”

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan mendapat kesejahteraan yang lebih tinggi. Adapun pasal yang menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 16 ayat (1) pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang memiliki sertiifkat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.”

Pasal 16 ayat (2) “tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.”

Penjelasan Pasal 8 UURI No. 14 Th. 2005 bahwa sertifikat pendidik adalah syarat wajib dan bukti profesionalitas bagi seorang guru, maka UURI No.

14 Th. 2005 pasal 82 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini (30 Desember 2005).”

Pemberlakuan UURI No. 14 Th. 2005 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu guru di Indonesia. Pengakuan guru sebagai tenaga professional dengan serangkaian standar mutu yang mendasarinya diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara signifikan. Gaji guru di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya gaji guru di Indonesia menimbulkan rendahnya daya beli guru. Muslich (2007:4-5) juga mencontohkan “sebagian guru mengakui ada yang mencari objek di luar tugas mengajar, seperti menjadi guru privat, menjadi tukang ojek, yang lebih seru lagi harus menjadi langganan tukang kredit di warung, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri lagi, guru juga menjadi langganan mengambil kredit di bank untuk keperluan perbaikan rumah, anak sekolah, kredit sepeda motor, dan lain-lain.” Fenomena kerja sambilan memungkinkan terjadinya penurunan kinerja seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, bahkan memunculkan fenomena absensi. Data-data di atas pada gilirannya justru akan semakin merendahkan citra dan wibawa guru di Indonesia.

Rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya mutu, kesejahteraan, citra dan wibawa guru di Indonesia merupakan masalah publik yang serius, karena jika tidak ditanggulangi akan menimbulkan efek domino yang kompleks. Subarsono (2009:24) mendefinisikan masalah publik sebagai “suatu gejala menjadi masalah publik ketika gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah. Oleh karena itu, masalah publik dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan oleh publik, dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah.”

Rendahnya kualitas guru di Indonesia dapat diukur dengan pencapaian kualifikasi akademik. Idealnya, (menurut PP No 19 Th 2005) guru dituntut untuk

memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4.

Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat dilihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika diamati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di ajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.

Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan ketiga adalah standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka standarisasi pengajaran juga perlu ditingkatkan. Standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjang terhadap standar dan kompetensi. Mutu pendidikan diukur oleh standar kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, akan lebih baik jika mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontroversi misalnya. Adanya sistem

evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah menenpuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didiikuti oleh peserta didik.

Selain itu, faktor kelima penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya kualitas dan kinerja Guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2007-2009 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

Atas dasar adanya satu penyebab kurangnya kinerja adalah kesejahteraan, maka pemerintah menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan adanya sertifikasi. Hal ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan dengan memberikan sertifikasi untuk pendidik. Kebijakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang dilakukan dengan uji kompetensi melalui penilaian portofolio, pada awal pelaksanaanya

menimbulkan kontroversi dan membuat resah kalangan guru bahkan hingga kini masih terjadi permasalahan pembayaran tunjangan profesi (Kompas, 21 Januari 2011). Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi pendidik memiliki derajat penerimaan (akseptabilitas) dan tingkat keterlaksanaan (implementabilitas) yang relatif rendah di kalangan guru sebagai sasaran kebijakan.

Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Ada yang berpendapat bahwa sejatinya sertifikasi adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bahkan yang lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi adalah cara pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi hanyalah kata pembungkus agar tidak menimbulkan kecemburuan profesi lain.

Komitmen pemerintah dan DPR RI dalam upaya memajukan pendidikan semakin menguatkan setelah disahkannya beberapa produk hukum baru dalam bidang pendidikan. Hal ini tercermin dalam UU No. 20 tahun 2005 tentang Sisdiknas, UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Konsekuensi dari itu, antara lain bahwa pemerintah harus segera menyelenggarakan program sertifikasi guru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan martabat guru. Program sertifikasi ini menjadi peluang dan tantangan bagi guru, Peluang oleh karena berbagai kesempatan untuk bermutu dan fasilitas kesejahteraan yang menjadi hak guru. Tantangan oleh karena program sertifikasi hanya akan diikuti oleh guru yang benar-benar sejati menjadi guru.

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, Sehingga diharapkan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini. Hal ini merupakan implementasi dari UU RI tentang Guru dan Dosen Bab IV

pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program sertifikasi ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja profesional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja profesional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Melalui sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu pendidikian minimal S-1 (Strata satu)/D-4 (Diploma empat) dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Program sertifikasi guru telah diimplementasikan sekitar 7 tahun dan menghasilkan sejumlah guru bersertifikasi, termasuk di Kabupaten Jember. Sesuai dengan data Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dari 24.850 orang guru di Kabupaten Jember, 5.686 di antaranya telah bersertifikasi. Salah satu wilayah yang diteliti dalam penelitian ini adalah SMPN 10 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Pemilihan SMPN 10 didasarkan masih kurang optimalnya mutu pendidikan SMPN 10 yang diukur dari beberapa aspek antara lain aspek kelulusan siswa, nilai UAN dan kompetensi guru sebelum sertifikasi dilakukan di sekolah. Selama periode sebelum adanya sertifikasi maka hasil yang dicapai SMPN di Kecamatan Patrang dijelaskan Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kelulusan SMP NEGERI/SWASTA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

No	SUBRA	Tahun Pelajaran	Kelulusan				Tahun Pelajaran	Kelulusan			
			Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan		Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan
1	SMP Negeri 2 Jember	2005/2006	201	201	0%	100%	2010/2011	193	193	0%	100%
		2006/2007	218	218	0%	100%	2011/2012	195	195	0%	100%
		2007/2008	192	192	0%	100%	2012/2013	173	173	0%	100%
		2008/2009	187	187	0%	100%	2013/2014	199	199	0%	100%
		2009/2010	182	182	0%	100%	2014/2015	212	212	0%	100%
2	SMP Negeri 4 Jember	2005/2006	147	146	1	99,32%	2010/2011	198	198	0%	100%
		2006/2007	136	135	1	99,26%	2011/2012	194	194	0%	100%
		2007/2008	199	199	0%	100%	2012/2013	203	203	0%	100%
		2008/2009	184	184	0%	100%	2013/2014	217	217	0%	100%
		2009/2010	186	186	0%	100%	2014/2015	228	228	0%	100%
3	SMP Negeri 7 Jember	2005/2006	175	174	1	99,43%	2010/2011	238	237	1	99,43%
		2006/2007	192	191	1	99,48%	2011/2012	291	291	0%	100%
		2007/2008	177	176	1	99,44%	2012/2013	281	281	0%	100%
		2008/2009	195	195	0%	100%	2013/2014	304	304	0%	100%
		2009/2010	214	213	1	99,53%	2014/2015	337	337	0%	100%
4	SMP Negeri 10 Jember	2005/2006	266	264	2	99,25%	2010/2011	261	261	0%	100%
		2006/2007	276	275	1	99,64%	2011/2012	281	281	0%	100%
		2007/2008	241	240	1	99,59%	2012/2013	289	289	0%	100%
		2008/2009	238	238	0%	100%	2013/2014	273	273	0%	100%
		2009/2010	253	252	1	99,60%	2014/2015	272	272	0%	100%
5	SMP Negeri 13 Jember	2005/2006					2010/2011	64	64	0%	100%
		2006/2007					2011/2012	112	112	0%	100%
		2007/2008					2012/2013	119	119	0%	100%
		2008/2009					2013/2014	113	113	0%	100%
		2009/2010	56	55	1	100%	2014/2015	123	123	0%	100%

Sumber Data dai DISPENDIK JEMBER, 2015

Hasil yang dicapai dari tingkat kelulusan tersebut mencerminkan mutu pendidikan di SMP Kecamatan Patrang Jember berbeda. Data kelulusan siswa sebelum sertifikasi keluar menunjukkan adanya siswa yang tidak lulus sehingga bisa dianggap mutu pendidikan kurang baik. Rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya mutu, kesejahteraan, citra dan wibawa guru yang masalah publik yang serius, karena jika tidak ditanggulangi akan menimbulkan efek domino yang kompleks.

Penelitian ini dilakukan pada tenaga pendidik pada SMPN 10 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dikarenakan di SMPN 10 masih ada guru yang tidak tersertifikasi. Selain itu, adanya pemberian sertifikasi yang sering kali tidak tepat waktu, menjadi hal yang menghambat pemberian sertifikasi di SMPN 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua guru telah layak dan pantas untuk mengajar, karena telah memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan adanya sebagian besar guru yang telah disertifikasi, maka konsekuensinya adalah adanya peningkatan mutu oleh masing-masing guru. Sedangkan guru yang belum tersertifikasi masih banyak aktivitas yang belum terselesaikan.

Selama beberapa perkembangan rata-rata SMPN 10 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember banyak yang mengalami penurunan meskipun ada yang mengalami kenaikan. Hal tersebut mengartikan bahwa mutu pendidikan dilihat dari nilai rata-rata siswa masih perlu ditingkatkan dengan adanya sertifikasi guru. Adapun guru SMPN di Kecamatan Patrang yang telah bersertifikasi dijelaskan Tabel 1.3. berikut .

Tabel 1.3 Jumlah Guru Yang Dapat Sertifikasi Dan Yang Belum Sertifikasi Di Smp Negeri Wilayah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Yang Dapat Sertifikasi										Yang Belum Sertifikasi
			Th. 2011		Th. 2012		Th. 2013		Th. 2014		Th. 2015		
			Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	
1	SMPN 2	Jl. Pb Sudirman Jember	19	16	19	16	19	19	19	19	19	19	0
2	SMPN 4	Jl. Nusa Indah Jember	28	20	28	24	28	26	28	28	28	28	0
3	SMPN 7	Jl. Cendrawasih Jember	28	21	28	23	28	23	28	28	27	27	0
4	SMPN 10	Jl. Nusa Indah Jember	37	29	37	29	37	32	37	34	37	34	3
5	SMPN 13	Jl. Rembangan Jember	12	7	12	9	12	11	12	12	12	12	0

Sumber: dinas pendidikan Kabupaten Jember, 2016

Adanya fakta tersebut maka sertifikasi guru dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan masih harus ditingkatkan pelaksanaannya. Realita ini penting untuk dikaji agar dapat diketahui apakah sekolah-sekolah yang lain mengalami kondisi yang sama. Hal inilah yang menurut penulis perlu diteliti, apakah sertifikasi ada pengaruhnya atau tidak terhadap kinerja guru. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Bagaiman Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru SMPN 10 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian dilakukan apabila ditemukan suatu masalah yang dianggap menarik untuk dikaji. Surakhmad (1990:33) mendefinisikan masalah adalah “Kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila ingin berjalan terus”. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Menurut Suryabrata (2008:13) hal-hal mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut.

- a. “Masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
- b. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas.
- c. Rumusan itu hendaklah memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu.”

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pengertian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana dampak kebijakan sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sertifikasi guru SMPN 10 di Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wahana aplikasi ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dan dapat memperluas aplikasi teori-teori, konsep-konsep, dan metode-metode penelitian dalam disiplin Ilmu Administrasi Negara.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk dari partisipasi publik, agar masyarakat semakin peduli tentang perannya sebagai evaluator kinerja pemerintah.
- c. Bagi Instansi penyelenggara berharap penelitian ini nantinya dapat memberi masukan yang bersifat positif

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23), yaitu:

“sebagaimana stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Sebuah penelitian ilmiah, penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berfikir yang rasional maupun empiris. Pengertian teori menurut Singarimbun dan Efendi (1989:37), “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”

Konsep dalam suatu penelitian mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut definisi konsep menurut Singarimbun dan Efendi (2006:33) “Menyatakan konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan melalui konsep diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.”

Dengan demikian, tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkasi masalah yang menjadi inti penelitian, Maka beberapa konsepsi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Kebijakan Publik;
2. Evaluasi Kebijakan;
3. Sertifikasi Guru

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Donald F. Kettl (1996) dalam Nugroho (2008:77) mengemukakan bahwa memasuki milenium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritikal, yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government least government*) proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik ,nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon entrepreneur government, dan kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik manajemen urusan-urusan publik.

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn (2003:132) mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Menurut Muchsin dan Putra (2002:23), mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah Winarno (2007:18) menyatakan “kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.”

Karena kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan pemerintah guna menyelesaikan masalah publik, maka dalam perspektif riset/penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan tersebut, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai hipotesis. Hal ini diungkapkan oleh Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Santoso dalam Edo (2012:6) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.” Berkaitan dengan pendapat ini, Subarsono (2009:4) menyatakan “studi kebijakan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai *independent variable*, sehingga berusaha mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan publik”.

Berdasarkan pendapat dan perspektif para pakar di atas, dapat dirumuskan suatu definisi konsep kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan arah tindakan yang merupakan hasil/produk dari proses/aktivitas para aktor politik (pemerintah) dalam suatu sistem politik.
- b. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pemecahan masalah publik.
- c. Dalam riset/studi/penelitian dengan fokus kebijakan publik, maka kebijakan publik berfungsi sebagai hipotesis.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan (Winarno, 2007: 225). Seringkali kebijakan publik gagal meraih

maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. (Jones dalam Winarno, 2007:226).

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2007:26). Sedangkan menurut Dunn (2000:608) evaluasi berkenaan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. William N. Dunn (2000:609-611) menjelaskan bahwa Evaluasi mempunyai beberapa fungsi.

1. Pertama, memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik;
2. Kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Ketiga, memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, berikut penjelasannya:

Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Tugas kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standart* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007:226).

Dari pendapat yang disampaikan oleh Lester dan Stewart, kemudian secara lebih taksis, Jones menjelaskan bahwa dalam upaya memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi (Jones dalam Winarno, 2007:227), berikut penjelasannya:

1. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting dibandingkan kegiatan yang lain. kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana

program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria inilah yang nantinya akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan;

2. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi;
3. Analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan;
4. Rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

2.2.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2005:120-121).

2.2.2 Pendekatan terhadap Evaluasi Kebijakan

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2005:124), yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

b. Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

c. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desicion theoritic evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholder*.

2.2.3 Tipe Evaluasi Program

Menurut Inayatullah (dalam Rohman, 2009:10) evaluasi terdiri dari tiga tipe yaitu sebagai berikut.

a. *Pre-programme evaluation*

Pre program evaluation dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek (Inayatullah, dalam Rohman, 2009:10).

b. *On-going evaluation*.

On-going evaluation didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai “sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian” (Inayatullah, dalam Rohman, 2009:10). PBB mendefinisikan sebagai berikut, ”*On-going atau concurrent evaluation* dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara *output* dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul” (Inayatullah dalam Rohman, 2009:10). Fungsi dari *on-going evaluation* menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program dijalankan;
- 2) Mengecek apakah target sasaran program benar-benar mendapat keuntungan dari program;
- 3) Membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap ”segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi)” dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada kebijakan selama pengimplementasian” (Inayatullah, 1980: 58 dalam rohman, 2009:11).

c. *Ex-post evaluation*.

PBB mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai proses yang diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang (Inayatullah dalam Rohman, 2009:10) :

- 1) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Kontribusi terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional;
- 3) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari kebijakan.

Bank Dunia mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai sebuah usaha untuk mereview (mengkaji ulang) secara komprehensif pengalaman dan akibat atau efek dari program sebagai sebuah basis untuk desain proyek dan formulasi kebijakan di masa depan (Inayatullah, 1980: 59 dalam rohman, 2009:10). *The ex-post* secara definisi adalah sebuah aktivitas yang diambil setelah penyelesaian proyek atau program.

Dari penertian di atas, penelitian ini lebih mengarah pada on going evaluation karena peneliti ingin melihat bagaimana tahapan program dilaksanakan, pola pemanfaatan program serta dampak yang ditimbulkan saat pengimplementasian program.

2.2.4 Jenis Evaluasi Program

Scriven (dalam Tayipnaps, 2000:36-37) mengklasifikasikan evaluasi menjadi dua jenis dasar evaluasi, yaitu sebagai berikut.

a. Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi formatif dilakukan pada saat tahap implementasi program atau selama program berjalan yang bertujuan memberikan informasi untuk perbaikan program. Evaluasi ini biasanya memberikan informasi untuk memutuskan baik atau tidaknya suatu program. Berbeda dengan evaluasi formatif yang berfokus pada perbaikan program, evaluasi sumatif lebih berfokus pada memberikan informasi untuk mendukung keputusan atau membantu dalam membuat keputusan tentang implementasi program, melanjutkan program, atau pengembangan program. Pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhir program atau setelah program berjalan, untuk memberi informasi tentang manfaat atau kegunaan program.

b. Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal

Sesuai dengan namanya, evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek, dan evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari luar.

Secara lebih rinci beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi menurut Ripley (Samodra Wibawa dkk, 1994:8-9 dalam Narendra Titis Hardjanti) adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan?
- b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka, dan memenuhi prosedur?
- c. Apakah program didesain secara logis?
- d. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan?

- e. Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?
- f. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi?
- g. Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat?
- h. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- i. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran? Apa jenis dampaknya?
- j. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat?
- k. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- l. Apakah tindakan program dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Dari berbagai persoalan tersebut, Samodra dkk (1994:9) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Pada penelitian ini evaluasi yang dilakukan lebih menekankan pada dampak dari kebijakan itu dijalankan.

2.3 Konsep Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan mempunyai peran dan tanggung jawab yang berat untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Guru memegang peran yang utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal dilingkungan sekolah, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar (Mulyasa, 2007:5). Selain itu guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas serta memiliki kinerja yang bagus. sehingga, peningkatan kualitas pendidikan harus

dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru.

Dalam mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas maka diperlukan guru yang profesional. Supria di dalam Mulyasa (2007) menyebutkan bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki minimal lima hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya.
- b. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada peserta didik.
- c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi.
- d. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
- e. Seyogyanya merupakan sebagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesionalnya.

Pengertian sertifikasi dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 adalah “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen”. Adapun pendapat lain dari Jamal (2009 : 59) tentang pengertian sertifikasi jika dilihat dari pelaksanaan sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sertifikasi adalah proses mendapatkan sertifikat profesional dengan cara mengumpulkan portofolio yang jumlahnya ada 10 unsur. Kesepuluh unsur tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Jika portofolio tidak mampu memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) secara intensif tentang tips dan metodologi menjadi guru profesional secara teori dan praktek.

Pengertian sertifikasi profesi guru itu sendiri dikemukakan oleh Kunandar (2008:79) adalah “proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kinerja”.

Jadi, gabungan dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah suatu proses yang harus dilewati guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik dengan cara memenuhi standar kualifikasi dan standar kinerja

sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang baik itu melalui portofolio maupun pendidikan dan pelatihan guru.

b. Dasar Pemikiran dan Landasan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi

Dasar pemikiran dan landasan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi guru ini telah diatur sesuai dengan undang-undang, peraturan dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sertifikasi. Undang-undang, peraturan dan keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/0/2007 tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru.
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.

c. Manfaat Sertifikasi Guru

Tujuan dari sertifikasi guru ini dikemukakan oleh Jamal (2009 : 29) adalah:

- 1) untuk meningkatkan mutu lulusan dan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Secara detail, sertifikasi guru bertujuan sebagai berikut :
- 2) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru
- 4) Meningkatkan proses dan hasil pendidikan.
- 5) Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Sedangkan manfaat dari sertifikasi ini menurut Jamal (2009 : 31) :

- 1) Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten dan merusak citra profesi guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas

dan tidak profesional.

- 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dari sertifikasi guru, profesi guru diakui sebagai tenaga ahli khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam prakteknya guru melaksanakan tugasnya secara kompeten, profesional dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu sertifikasi juga bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang kurang baik (kurang berkualitas).

d. Sertifikasi Guru Melalui Penyusunan Portofolio

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualitas akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi pribadi dan kompetensi sosial yang dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional yang dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Menurut Samani (2010:3) secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio guru berfungsi sebagai;

- 1) Wahana guru untuk menampilkan dan/ atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktifitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung.
- 2) Informasi/ data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum).
- 4) Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

2.3.1 Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Hal ini untuk menjadikan organisasi tetap bertahan dan terus melangsungkan kehidupannya, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik.

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan secara spesifik dilihat dari persepsi masyarakat luas dapat disebabkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumberdaya manusia. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat (Rini, 2011:81). Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun yang *intangible* (tidak dapat dipegang) (Suryosubroto, 2010:210).

Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki “mutu” akan membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu memilikinya (Sallis, 2006:52)

Mutu berarti sesuatu yang dinilai dari tingkat keunggulan. Mutu dalam konsep yang absolut berarti harus *high quality* atau *top quality*. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, meubel mewah, perabot mewah.

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas *input*, proses, produk/*output*, dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses. Proses pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAKEM yang efektif. *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan.

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai

oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achivement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Sowiyah, 2010:24).

Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan oleh beberapa sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumberdaya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus masalah mutu bisa mencakup kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan- perlengkapan (Sallis, 2006:103).

Pandangan secara umum banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan secara professional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Standar nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan norma dalam pendidikan

Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang professional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara professional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompeten.

Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik.

Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis, dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum, yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Sallis, 2006: 30-31).

Banyak aspek yang berkaitan dengan mutu pendidikan, dan banyak pula pandangan yang komprehensif mengenai mutu pendidikan. Hal ini penting untuk melihat kondisi pendidikan secara utuh, meskipun secara praktis fokus dalam melihat mutu bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian atau tinjauan. Mutu pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa disadari, namun ini merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar untuk memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan mempunyai kesesuaian dari rendah ke tinggi sehingga berkedudukan sebagai suatu variable. Pendidikan sebagai suatu sistem, variabel kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai variabel bebas yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualitas guru, anggaran, kelengkapan fasilitas belajar, dan sebagainya.

Kita memang bisa mengetahui mutu ketika kita mengalaminya, tetapi kita merasa tetap kesulitan ketika mendiskripsikan dan menjelaskannya. Meskipun tidak ada definisi mengenai mutu/kualitas yang dapat diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat persamaan dalam faktor-faktor antara lain:

- a. mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan
- c. mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang)

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-

kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber- sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang dibutuhkan dan tenaga professional kependidikan dapat disediakan di sekolah (Fattah, 2009:90).

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

1. standar isi
2. standar proses
3. standar kompetensi lulusan
4. standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. standar sarana dan prasarana
6. standar pengelolaan
7. standar pembiayaan
8. standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta keberadaan bangsa yang bermartabat.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat (Usman, 2009:513-514).

Namun dalam kenyataannya, perhatian dunia pendidikan akan kualitas/mutu pendidikan menjadi sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan dunia bisnis.

Oleh karena itu, mutu dan penjaminan mutu dapat dipandang sebagai inovasi dalam pendidikan. Sosialisasi menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi penjaminan mutu pendidikan.

Profesi guru merupakan tugas yang harus diemban oleh seorang tenaga kependidikan, guru diharapkan dapat memimpin dan mengarahkan kegiatan belajar-mengajar para siswanya. Oleh karena itu, predikat guru harus dipertahankan sebagai cerminan pribadi siswa. Menurut Surya (2004:67):

“Seorang guru dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas siswa, seperti terciptanya pribadi yang mandiri, berperilaku baik, punya pengetahuan dan keterampilan. Guru tidak saja bertugas menyampaikan materi pelajaran saja, melainkan diharapkan juga dapat memotivasi siswanya.”

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memnuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Menurut Nataamijaya (Mulyasa, 2008:34) mengemukakan bahwa :

”Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses atau, jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan sertifikasi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi.”

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Jadi, pada dasarnya, tiap profesi memerlukan pembuktian atas tingkat profesionalitas yang dimiliki oleh tiap anggota profesi. Proses pembuktian profesionalitas guru dilakukan melalui proses sertifikasi guru. Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005 menyatakan bahwa di dalam Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa seorang guru hendaknya mengikuti sertifikasi profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Menurut UURI No 14 Th 2005, Pasal 1 (11) “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.” Sesuai dengan definisi ini, maka output dari Program Sertifikasi Guru adalah guru yang memperoleh sertifikat pendidik (guru bersertifikasi). Konsep guru bersertifikasi merepresentasikan beberapa substansi penting, yaitu sebagai berikut.

UURI No 14 Th 2005, Pasal 1 (12) menjelaskan, “sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diasumsikan bahwa guru bersertifikasi adalah guru yang diakui profesionalitasnya.

Dalam Program Sertifikasi Guru, guru bersertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan dengan lolos uji kompetensi melalui penilaian portofolio maupun DPG, di mana penilaian tersebut mencakup 4 aspek kompetensi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional. Artinya, guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi/profesionalitas, oleh karena itu dinyatakan profesional.

Berkaitan dengan 2 point di atas, Muslich (2007:3) “guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. “Guru bersertifikasi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sesuai dengan amanat UURI No 14 Th 2005 pasal 16 (2), yaitu sebesar satu kali gaji pokok”.

Berdasarkan beberapa point di atas, dapat disimpulkan bahwa guru bersertifikasi adalah guru yang profesional dan mendapat peningkatan kesejahteraan sesuai dengan undang-undang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pandangan sebagai berikut.

Menurut Jalal *et al* (2009), prosedur Program Sertifikasi Guru –penilaian

portofolio maupun DPG yang diatur dalam Permendiknas No 18 Th 2007 – merupakan kulminasi dari serangkaian rencana, uji coba, dan evaluasi, sehingga merupakan suatu prosedur dan model yang paling tepat dan seimbang.

Menurut Muslich (2007), *Passing grade* sebesar 850 sangat sulit untuk dilampaui, utamanya bagi guru yang hanya memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 (berarti $850 = 75\%$ dari nilai maksimal skor). Jadi, guru yang berhasil melewati *passing grade* tersebut dapat diasumsikan sebagai guru yang berpengalaman dan profesional.

Bagi guru yang telah mengikuti sertifikasi profesi, maka guru tersebut sudah memenuhi persyaratan komponen portofolio. Salah satu syarat komponen portofolio adalah dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh guru. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh guru tersebut otomatis dapat meningkatkan kinerjanya pada saat proses belajar mengajar karena pengetahuan di dalam pembelajarannya bertambah. Selain itu dari pengalaman mengajarnya, karya pengembangan profesinya, prestasi akademik, dan lain-lain.

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang akhirnya berdampak pada mutu pendidikan.

Sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia baik dalam prosesnya maupun hasil pendidikannya dengan cara meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan profesionalisme guru (dengan memberikan standar kualifikasi dan standar mutu pendidikan sebagai pendidik) sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Jamal (2009) bahwa sertifikasi guru dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru (memberikan tunjangan profesi bagi guru yang lulus sertifikasi) dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas dari guru-guru yang telah lulus sertifikasi.

Sertifikasi guru ini merupakan cara untuk meningkatkan mutu guru dengan mengeluarkan lulusan yang memiliki kinerja sesuai dengan Undang-undang (kinerja sebagai agen pembelajaran) dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan bagi guru yang lulus uji kinerja (sertifikasi).

Menurut Mulyasa (2007), sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, kinerja yang baik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Hal utama yang menjadi penekanan dalam proses sertifikasi adalah kompetensi guru. Penilaian portofolio sebagai dasar untuk menilai seorang guru kompeten atau tidak sangat tidak sesuai dengan keadaan sosiologis rakyat Indonesia yang minim kesadaran, dimana masih terdapat praktik-praktik manipulasi data.

Muslich (2007) menyatakan bahwa ada peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya juga bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Seseorang yang ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik (professional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikasi profesi”. Sedangkan bagi guru di sekolah (guru dalam jabatan) yang ingin memperoleh sertifikat pendidik, dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten atau Kota setempat untuk diseleksi (internal skill audit). Apabila hasil dari seleksi tersebut memenuhi syarat, kemudian diikuti dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus maka akan memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang tidak lolos dalam internal skill audit maka

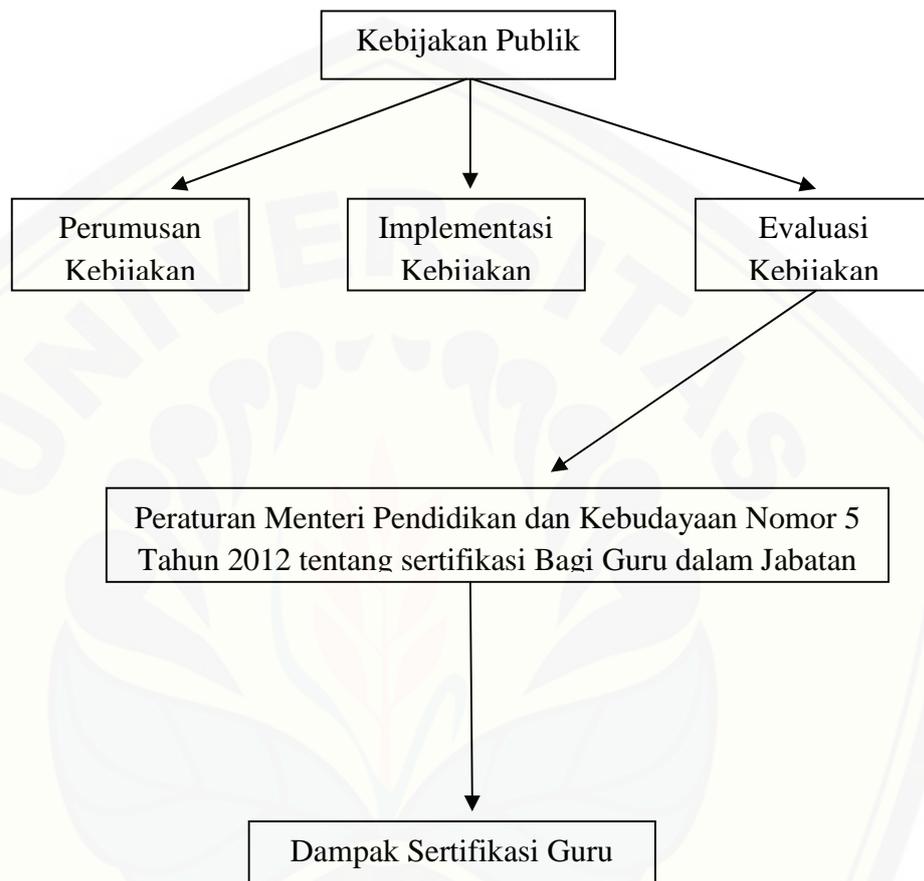
disarankan mengikuti inservice training dahulu. Jika telah dianggap layak dapat dilanjutkan uji sertifikasi.

Sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru. Solikin (2010) yang meneliti dampak sertifikasi guru SMKN Kota Bandung dan Kabupaten Bandung terhadap kinerja menemukan bahwa ada pengaruh antara sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Selain itu, menurut Suparlan (2008), adanya sertifikasi guru ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan jalan mensejahterakan guru sehingga kinerjanya akan meningkat. Meskipun implementasi sertifikasi masih perlu mendapat perhatian tetapi sertifikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya motivasi pembuktian profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya.

Program sertifikasi profesi guru sebenarnya dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Bagaimana persepsi guru itu sendiri dalam menanggapi program sertifikasi profesi guru juga akan mempengaruhi bagaimana motivasi guru itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, karena setiap guru pasti akan berusaha meningkatkan kualitas kerjanya baik bagi guru maupun yang belum tersertifikasi.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, dapat dipercaya bahwa guru bersertifikasi output dari Program Sertifikasi Guru adalah guru yang profesional. Guru seperti inilah yang diharapkan mampu membawa pengaruh positif pada mutu pendidikan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin banyak guru bersertifikasi, maka mutu pendidikan akan semakin meningkat.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu cara prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengetahui dan menemukan sesuatu yang baru tentang suatu masalah atau fenomena yang terjadi pada suatu objek. Dalam melakukan penelitian diperlukan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Sugiyono (2004:4) menyatakan bahwa metode penelitian adalah “Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian, karena metode penelitian digunakan untuk mencari kebenaran atas suatu permasalahan. Menurut Bogdan dan Taylor yang diterjemahkan oleh Affandi (1993:25), metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang dipakai dalam mendekati persoalan persoalan dan usaha mencari jawabannya. Penelitian pada hakekatnya merupakan usaha atau proses yang dilakukan secara sistematis yang untuk menghasilkan pengetahuan.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Gunawan (2013:82), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka metode penelitian adalah cara berfikir untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman dan Akbar, 2009:41).

Hasil dari sebuah penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitian dengan memperhatikan kesesuaian terhadap fenomena yang teliti. Teknik-teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian antara lain:

- a. Jenis penelitian
- b. Fokus penelitian
- c. Sumber Data
- d. Teknik Pemilihan Informan
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Keabsahan Data
- g. Validitas Data
- h. Analisis Data

3. 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitas menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Misalnya perilaku informan, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karena menggunakan metode penelitian kualitatif, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-positivist*, khususnya *critical theory*.

Paradigma non positif pada intinya merupakan paradigma yang mementingkan pencarian makna dari setiap tindakan sosial aktor. Hal yang sangat penting menurut paradigma ini adalah interpretasi. Paradigma ini menekankan bahwa apa yang disebut *laws* atau generalisasi (yang bersifat kausal) tidak selamanya diperlukan untuk memahami gejala sosial. Dengan demikian, setiap tindakan (*actions*) termasuk bahasa mempunyai makna simbolik yang tinggi dan harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data yang biasanya dimanfaatkan adalah

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Begitu juga dengan metode dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, karena metode tersebut dibutuhkan sesuai dengan tema yang akan dibahas untuk memilih informan maka membutuhkan metode tersebut dalam pengumpulan data agar lebih valid.

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan dampak dari sertifikasi guru di SMPN 10 Kabupaten Jember.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan tertentu ketika menentukan fokus penelitian. Menurut Moleong (2000:62), ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu presis data mana yang perlu dikumpulkan dan

data mana pula yang, walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti agar tidak terjebak pada bidang kajian yang lebih luas. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu :

- a. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, maka penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.
- b. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu akan direduksi. (Moleong, 2005 : 63).

Fokus penelitian dilakukan pada dampak yang terjadi pada guru SMPN 10 Jember setelah mendapatkan sertifikasi. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul penelitian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah guru SMPN 10 Jember. Batasan waktu penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Januari-Mei 2016.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama (responden) yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan sertifikasi guru di SMPN 10 Jember.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data ini dapat diperoleh dari artikel, internet, dan dokumentasi perusahaan (Sekaran, 2006:60) pada penelitian ini menggunakan data berupa data-data pemerintahan, pegawai dan lain-lain.

Dalam penelitian ini sumber data yang berkaitan dengan kebutuhan pelatihan pegawai pada guru SMPN 10 Jember maka akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan sumber data ialah :

- a. Kepala Sekolah SMPN 10 Jember
- b. Guru SMPN 10 Jember.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Peneliti dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Menurut Moleong (2000:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi (Lincoln dan Guba, 1985). Kemudian dalam menentukan informan, harus dipenuhi beberapa kriteria sehingga informan tersebut benar-benar orang yang tepat dan memahami masalah penelitian ini. Menurut Faisal (1990:67), kriteria informan adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturisasi yaitu proses penghayatan bukan proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektifitas.

- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Kuncoro (2004:43) pemilihan informan berdasarkan pada kriteria tertentu. Pemilihan informan tidak berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas dari informan terhadap masalah yang akan diteliti.

Pelaksanaan di lapangan guna pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti di dalam memperoleh data. Informan penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Sekolah SMPN 10 Jember
- b. Guru SMPN 10 Jember.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Salim 2003:67). Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik survai.

Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk, yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai suatu peristiwa. Pada beberapa situasi peneliti bahkan bisa meminta

informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Tipe wawancara yang kedua adalah wawancara yang terfokus, dimana informan diwawancarai dalam waktu yang pendek. Dalam kasus ini, wawancara tersebut bisa tetap *open-ended* dan mengasumsikan cara percakapan namun pewawancara tidak perlu mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protokol studi kasusnya. Tipe wawancara yang ketiga memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sejalan dengan survai (Yin, 2002: 108-110).

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga informan dapat menjawab dengan leluasa pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti telah menetapkan beberapa pedoman pertanyaan yang ditujukan untuk informan penelitian. Wawancara yang dilakukan pada informan penelitian yang dipilih antara lain guru SMPN 10 Jember..

3.6.2. Observasi

Kuncoro (2003:45) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamatai terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Kuncoro,

2003:47). Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *non participant observation*, kemudian untuk memudahkan pengumpulan data maka peneliti memilih instrumen observasi secara terstruktur agar mempermudah dalam penyusunan sub-sub penelitian guna menunjang laporan hasil penelitian.

3.6.3. Rekaman Arsip

Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi seperti peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat, daftar nama dan komoditi lain yang relevan, data survai, data rekaman atau data sensus yang terkumpul, rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran organisasi periode tertentu. Rekaman-rekaman arsip ini dapat digunakan bersama-sama dengan sumber informasi lain dalam pelaksanaan studi kasus. Namun demikian, tidak seperti bukti dokumenter, kegunaan rekaman arsip akan bervariasi pada satu studi kasus lainnya. Pada beberapa penelitian, rekaman tersebut begitu penting sehingga bisa mejadi obyek perolehan kembali dan data analisis yang luas. Pada penelitian-penelitian lainnya rekaman arsip mungkin hanya sepintas relevansinya. Bilamana bukti arsip relevan, peneliti harus berhati-hati untuk menentukan kondisi yang menghasilkan bukti yang bersangkutan beserta keakuratannya (Yin, 2002: 106-107).

Teknik pengumpulan data dengan rekaman arsip ini akan dilakukan oleh peneliti karena pada dasarnya rekaman arsip merupakan sumber data yang memiliki peran sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi pemahaman suatu peristiwa. Rekaman arsip seperti hasil wawancara dengan informan dan bukti dokumentasi pada saat penelitian.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa arsip-arsip lembaga terkait, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, rekaman dan foto serta dokumentasi lainnya yang dapat menunjang data penelitian.

3.7 Keabsahan Data

Penelitian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui (Yin, 2002: 1087):

a. Kredibilitas

Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, member chek.

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti datang sekali ke lapangan. Sehingga peneliti harus memperpanjang pengamatan nantinya akan memperoleh link dan *chemistry*. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis. Triangulasi yaitu pengecekan terkadang informan keliru dengan kata-kata sehingga tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Kasus negatif adalah kasus ganjil yang ditemukan saat penggalian data dan kasus tersebut bertentangan dengan data yang lainnya serta dapat menjadi kunci kejanggalan data sebelumnya atau yang lainnya. Dengan analisis kasus negatif peneliti menelusuri lebih lanjut data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Penelitian bisa dilakukan melalui tim, peneliti dapat mendiskusikan hasil temuan sementara dengan teman sejawat peneliti. Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah sepakat data yang diberikan berarti data valid, sehingga semakin kredibel. Akan tetapi menjadi sebaliknya yaitu tidak valid dan kredibel apabila para pemberi data meragukan data dan peneliti tidak melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan.

b. Konfirmabilitas

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas, sehingga

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian harus ada proses, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

c. Transperabilitas

Transperabilitas berkenaan dengan hasil penelitian, hingga manakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mendapatkan derajat transperabilitas yang tinggi tergantung pada kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial temuan penelitiannya dan melakukan refleksi dan analisis kritis yang ditunjukkan dalam pembahasan penelitian. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transperabilitas.

Berdasarkan berbagai uraian yang dikemukakan di atas penelitian merupakan sebuah proses yang memerlukan perhatian yang benar-benar serius seandainya ingin diperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Perhatikan Tabel 3.1 berikut, yang menggambarkan ringkasan penelitian kualitatif sebagai suatu proses.

Tabel 3.1. Penelitian Kualitatif sebagai Proses

Fase	Uraian
Periset sebagai subjek penelitian yang multi cultural	Penelitian bersifat historis dan penelitian tradisi, konsep dari diri dan semuanya, tergantung pada etika dan politik penelitian
Paradigma teoritis dan interpretative	Positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, feminisme, model etnik, model Marxis, <i>cultural studies</i>
Strategi penelitian	Desain studi, studi kasus, etnografi, observasi partisipasi, fenomenologi, <i>grounded theory</i> , metode biografi, metode histories, penelitian tindakan, dan penelitian klinis
Metode pengumpulan data dan analisis data empiris	Interview, observasi, artefak, dokumen dan rekaman, metode visual, metode pengalaman pribadi, analisis dengan bantuan program computer, dan analisis tekstual

3.8 Validitas Data

3.8.1. Triangulasi Data

Moleong (2000:178) menyatakan informasi yang diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas sehingga peneliti harus melakukan triangulasi dalam mendapatkan/menggali informasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Praktik triangulasi tergambar dari kegiatan peneliti yang bertanya pada informan A dan mengklarifikasinya dengan informan B serta mengeksplorasikannya pada informan C.

Suatu informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa validitasnya sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Peneliti perlu melakukan Triangulasi sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

3.8.2. Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber (Moleong , 2000:178) Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.

Peneliti lebih mengutamakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Tujuannya yakni agar penelitiannya dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

3.9 Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008: 88).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa katifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

3.9.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sehingga reduksi data memerlukan proses berfikir sensitif dan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Salim, 2007:78). Sedangkan data-data yang tidak digunakan adalah data-

data yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan pelatihan pegawai. Peneliti mereduksi data penelitian yang tidak berhubungan langsung dengan Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru di SMPN 10 Kabupaten Jember .

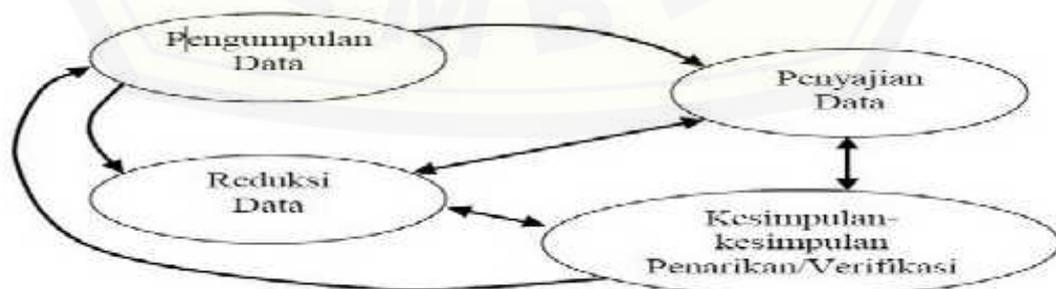
3.9.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya serta penyajian data dalam penelitian adalah dengan sistematis melalui gambaran atau skema. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.9.3. Penarikan Kesimpulan

Proses mengartikan atau penarikan segala hal yang ditemui selama penelitian yang dilakukan secara terus menerus. Kesimpulan yang dihasilkan harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Tehnik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Analisis Data

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan merupakan pernyataan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan mengenai dampak sertifikasi guru di SMPN 10 Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1. Motivasi mengajar meningkat

Sertifikasi guru secara tidak langsung membuat guru semakin termotivasi dalam mengajar. Karena guru yang tersertifikasi harus merasa lebih baik dari guru yang belum tersertifikasi. Mereka akan berusaha untuk memperbaiki metode belajar agar siswa lebih tertarik sehingga siswa akan termotivasi pula dalam belajar, dan dengan tunjangan sertifikasi guru mampu menyediakan media tanpa tergantung dengan sekolah, misalnya laptop, buku-buku literature, dan media lain.

2. Metode belajar mengajar guru lebih variatif dan kreatif

Saat PLPG guru di beri pelatihan-pelatihan mengajar dengan berbagai metode yang variatif dan kreatif, hal ini sebagai bekal untuk guru yang telah tersertifikasi harapannya mampu mengajar dengan metode yang variatif dan kreatif seperti metode diskusi, belajar diluar kelas, dan pemanfaatan internet. Sehingga dengan metode yang variatif dan kreatif anak didik tidak bosan dan mengajar menjadi menyenangkan.

3. Meningkatkan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru menjadi solusi bagi permasalahan pendidik khususnya guru, karena kesejahteraan guru menjadi meningkat. Setelah adanya sertifikasi guru, guru dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan dapat meningkatkan sarana penunjang pengajaran. Sebagian besar guru yang

telah tersertifikasi membeli laptop sebagai sarana penunjang dalam mengajar, selain itu beberapa diantaranya juga melanjutkan sekolah S2, dan juga digunakan untuk biaya sekolah anaknya sampai ke perguruan tinggi. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja guru dan profesionalisme guru, dan pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Meningkatkan profesionalisme guru

Sertifikasi guru disadari semakin meningkatkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru ini menunjuk kepada komitmen para guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sebagai pendidik.

b. Dampak Negatif

1. Guru yang belum tersertifikasi jam mengajar berkurang

Jam mengajar 24 jam/minggu diwajibkan bagi guru yang tersertifikasi. Hal tersebut sangat mengganggu karena terbatasnya ruang kelasifikasi jam mengajarnya menjadi berkurang karena untuk memenuhi jam mengajar guru yang tersertifikasi. Selain itu juga berdampak pada siswa jika guru mengajar bukan pada bidang yang sesuai.

2. Kecemburuan sosial dikalangan lingkungan masyarakat

Sertifikasi guru tanpa disadari menimbulkan kecemburuan sosial khususnya di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kebanyakan muncul dari profesi non guru, karena merasa profesi guru adalah profesi yang mudah dan gajinya besar. Dengan munculnya sertifikasi guru non sertifikasi semakin merasa bahwa profesi guru sangat menguntungkan. Padahal profesi guru membutuhkan kerja keras dan tidak semudah yang mereka bayangkan. Tugas dan peran guru cukup kompleks, bahan tidak hanya selesai di sekolah tetapi juga di rumah.

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian dan pemahaman peneliti selama melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang berguna bagi berjalannya sertifikasi guru di Kabupaten Jember khususnya di SMPN 10 Jember adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan jam mengajar sebaiknya pihak SMPN 10 lebih memperhatikan dan mencari solusi atau alternatif yang baik. Bisa dengan menambah ruang kelas atau sebagainya. Agar guru yang belum tersertifikasi jam mengajarnya tidak ikut berkurang.
- b. Dalam mengatasi kecemburuan sosial sebaiknya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, segera memberikan sertifikasi kepada guru yang belum tersertifikasi. Dan juga untuk profesi diluar guru pemerintah juga harus memberikan tunjangan atau penghargaan bagi profesi-profesi yang memang berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa indonesia, contohnya seperti pekerja sosial / relawan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka.
- Barizi, Ahmad. 2009. *Menjadi Guru Unggul*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2007. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodelogi Reseach*. Jogjakarta : Yayasan pendidikan fakultas Psikologi UGM.
- Hendarto, Koes. 2010. *Pengaruh Persepsi Sertifikasi Guru Dan Kompetensi Guru Terhadap Motivasi Kerja Guru Pada Guru SMA Negeri 2 Surakarta*. UMS
- Jamal, Asmani, Ma'mur. 2009, *7 Kompetensi Guru Menyenangkandan. Profesional*, Jogjakarta : Power Book (Ihdina).
- Keban, Yeremias.2008. *Enam Dimensi Strategis. Administrasi Publik. Kongspe, teori dan Isu*. Yogyakarta. Gavamedia
- Komaruddin. 1987. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung : Angkasa.
- Kunandar. 2009. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lestari, Sri. 2010. *Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di MTS N Plinjon Filial Trucuk Klaten*. UIN Jogjakarta.
- Miller, Maffew dan Michael Hiberman. 1992. *Ananlisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muslich, Mansur. 2007. *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Nata, Abudin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- Sudjana, 2004. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.
- Sujanto, Bejdo. 2009. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sukardi. Sari, 2008. *Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru Ekonomi Akuntansi SMA dan SMK Negeri se Kota Semarang Tahun 2007*. UNNES
- Sulistyorini. 2001. *Hubungan antara Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah dan iklim Organisasi dengan Kinerja Guru*. Ilmu Pendidikan.
- UNDP, 2001, 'Putting People First: A Compact for Regional Decentralization', Indonesia Human Development Report 2001/02. pp. 43-45 http://www.undp.or.id/publications/iHDR01/02_iHDR.2001[diakses tanggal 20 Oktober 2012)
- Uno, Hamzah B. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Usman, Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang dan Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th 1989

Undang-Undang Nomor 20/2003 pasal 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8

Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005

Internet

(http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY=, diakses 7 Desember 2015).

Lp3ipusat.Wordpress.Com diakses 7 Desember 2015).



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka.
- Barizi, Ahmad. 2009. *Menjadi Guru Unggul*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 2007. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodelogi Reseach*. Jogjakarta : Yayasan pendidikan fakultas Psikologi UGM.
- Hendarto, Koes. 2010. *Pengaruh Persepsi Sertifikasi Guru Dan Kompetensi Guru Terhadap Motivasi Kerja Guru Pada Guru SMA Negeri 2 Surakarta*. UMS
- Jamal, Asmani, Ma'mur. 2009, *7 Kompetensi Guru Menyenangkandan. Profesional*, Jogjakarta : Power Book (Ihdina).
- Keban, Yeremias.2008. *Enam Dimensi Strategis. Administrasi Publik. Kongspe, teori dan Isu*. Yogyakarta. Gavamedia
- Komaruddin. 1987. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung : Angkasa.
- Kunandar. 2009. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lestari, Sri. 2010. *Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di MTS N Plinjon Filial Trucuk Klaten*. UIN Jogjakarta.
- Miller, Maffew dan Michael Hiberman. 1992. *Ananlisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muslich, Mansur. 2007. *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Nata, Abudin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- Sudjana, 2004. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.
- Sujanto, Bejdo. 2009. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sukardi. Sari, 2008. *Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru Ekonomi Akuntansi SMA dan SMK Negeri se Kota Semarang Tahun 2007*. UNNES
- Sulistyorini. 2001. *Hubungan antara Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah dan iklim Organisasi dengan Kinerja Guru*. Ilmu Pendidikan.
- UNDP, 2001, 'Putting People First: A Compact for Regional Decentralization', Indonesia Human Development Report 2001/02. pp. 43-45 http://www.undp.or.id/publications/ihdr01/02_ihdr.2001[diakses tanggal 20 Oktober 2012)
- Uno, Hamzah B. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Usman, Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang dan Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Th 1989

Undang-Undang Nomor 20/2003 pasal 39

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8

Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005

Internet

(http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY=, diakses 7 Desember 2015).

Lp3ipusat.Wordpress.Com diakses 7 Desember 2015).



PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Guru Bidang Studi :

a. Bagaimana sertifikasi guru menurut Bapak / Ibu?

.....
.....

b. Apa saja yang telah Bapak / Ibu peroleh dengan sertifikasi?

.....
.....

c. Apa saja manfaat sertifikasi guru bagi Bapak / Ibu?

.....
.....

d. Bagaimana keterkaitan sertifikasi guru dengan kesejahteraan menurut Bapak / Ibu?

.....
.....

e. Apakah menurut Bapak / Ibu sertifikasi dapat meningkatkan mutu pendidikan?

.....
.....

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



Bersama Bapak H. Didiek Triyanto R. S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah SMPN 10 Jember



Bersama Bapak Syaifudin M.Pd Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Jember



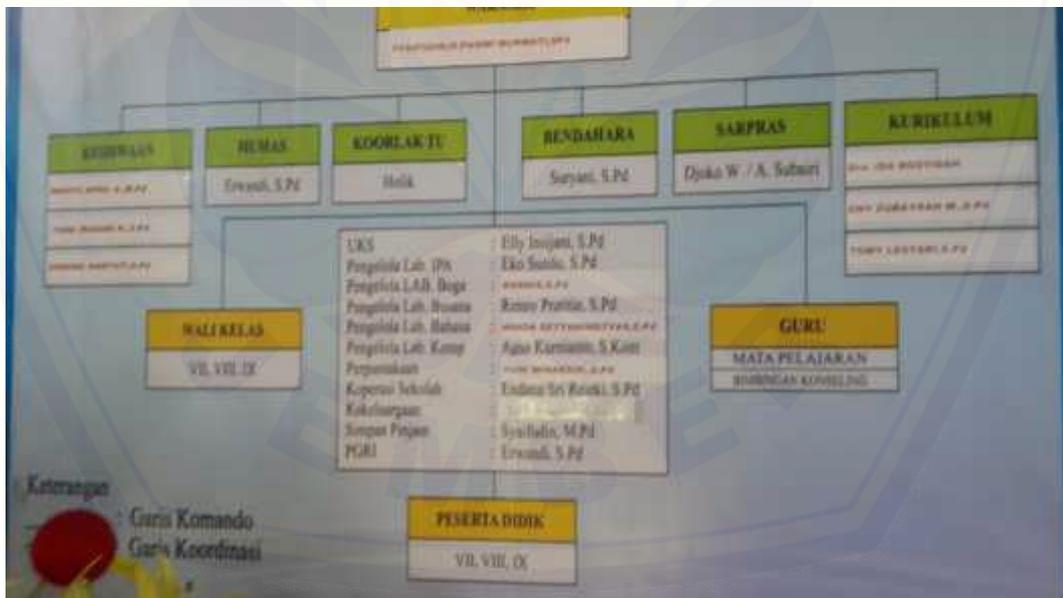
Bersama Bapak Wahyu April, M.Pd Waka Kesiswaan SMPN 10 Jember



Bersama Guru dan Murid SMPN 10 Jember

IDENTITAS SEKOLAH	
1 NAMA SEKOLAH	SMP NEGERI 10 JEMBER
2 NOMOR STATISTIK SEKOLAH	22.0524.18.004
3 PROPINSI	JAWA TIMUR
4 OTONOMI DAERAH	JEMBER
5 KECAMATAN	PATRANG
6 DESA / KELLURAHAN	JEMBER LOK
7 JALAN DAN NOMOR	J. NUSA MUDA
8 KODE POS	68113
9 TELEPON	
10 FAX/CIKILE / FAX	
11 DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> PERKOTAAN <input type="checkbox"/> PEDESAAN
12 STATUS SEKOLAH	<input checked="" type="checkbox"/> NEGERI <input type="checkbox"/> SWASTA
13 KELOMPOK SEKOLAH	UMUM
14 AKREDITASI	
15 SURAT KEPUTUSAN / SK	NOMOR : 0266/0/1901 TGL : 29-08-1991
16 PENERBIT SK (DITANDAIKAN DENGAN METERAI PENTINGKATAI SMP, KETIDAKVAJANT RI)	
17 TAHUN BERDIRI	TAHUN : 1991
18 TAHUN PERUBAHAN	TAHUN : ..
19 KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	<input checked="" type="checkbox"/> PAGI <input type="checkbox"/> SIANG <input type="checkbox"/> PAGI DAN SIANG
20 BANGUNAN SEKOLAH	<input checked="" type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <input type="checkbox"/> BUKAN MILIK SENDIRI
21 LOKASI SEKOLAH	KOTA
22 JARAK KE PUSAT KECAMATAN	1. 2. KM
23 JARAK KE PUSAT OTODA	1. 2. KM
24 TERLETAK PADA LINTASAN	<input checked="" type="checkbox"/> DESA <input type="checkbox"/> KECAMATAN <input type="checkbox"/> KABUPATEN <input type="checkbox"/> PROVINSI
25 PERALIHAN/PERUBAHAN SEKOLAH	1. SEKOLAH TEKNIK PERTAMA 1931 2. SEKOLAH TEKNIK TERAKSI II 1952 3. SMP NEGERI 10 JEMBER 1991
26 JUMLAH KEANGGOTAAN BAYON	3 SEKOLAH
27 ORGANISASI PENYELENGGARA	<input checked="" type="checkbox"/> PEMERINTAH <input type="checkbox"/> YAYASAN <input type="checkbox"/> ORGANISASI KEPALA

Papan Profile Sekolah SMPN 10 Jember



Papan Bagan Struktur Organisasi SMPN 10 Jember

Nama	NIP	Gol / Ruang	Pangkat TMT	Jabatan	Masa Kerja Tahun Bekerja	Pendidikan		Tempat / tgl lahir	Catatan Mutasi	Ket
						Nama Jurusan	Tingkat Eselon			
Hj. Tri Kardiningsih, S.Pd	19630212 196512 2 001	III/c	01/04/2009	Guru Muda	21	4	Sarjana	Sampang, 22-08-1963		
Evy Zahaidah W, S.Pd	19671014 198808 2 004	III/c	01/04/2009	Guru Muda	19	1	Sarjana	Jember, 14-10-1967		
Benny Pratomo, S.Pd	19691010 199708 2 004	III/c	01/10/2008	Guru Muda	12	7	Sarjana	Probolinggo, 20-10-1968		
Sri Purwaningsih, S.Pd	19640102 198412 2 001	III/c	01/04/2010	Guru Muda	20	4	Sarjana	Jember, 02-03-1964		
Erizang Murtanti, S.Pd	19670801 199202 2 001	III/c	01/10/2011	Guru Muda	17	7	Sarjana	Bectan, 01-06-1967		
Hadi Purwaningsih, S.Pd	19640106 199601 1 001	III/c	01/10/2011	Guru Muda	13	8	Sarjana	Jember, 09-02-1966		
Satrio, S.Pd	19621104 199002 2 001	III/c	01/10/2011	Guru Muda	13	8	Sarjana	Padang, 04-11-1958		
Suci Murtawati, S.Pd	19670815 199803 2 001	III/c	01/10/2011	Guru Muda	11	7	Sarjana	Blitar, 10-06-1967		
Wahyu April A, S.Pd	19770413 200501 1 011	III/c	01/10/2013	Guru Muda	6	9	S2	Kediri, 17-04-1977		
Dra. Itha Rosyidah	19690930 200701 2 012	III/c	01/10/2013	Guru Muda	14	1	Sarjana	Jember, 30-09-1969		
Holik	19601008 198602 1 005	III/b	01/10/2006	Penata Muda Tk I	15	2	STM	Jember, 08-10-1960		

Jember, 24 Januari 2016
 Kepala SMPN 10 Jember

 SMPN 10
 Jl. Jember - Madiun
 Probolinggo
 JEMBER
 No. Telp. 0365-989031012



DATA GURU TIDAK TETAP SMPN 10 JEMBER

DATA GTT/PTT DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

UNIT ORGANISASI : SMP NEGERI 10 JEMBER

Tempat : Jl. Nusa Indah No. 25 Telp. (0331) 485223 Jember

No.	Nama	N U P T K	Masa Dinas		Jabatan	Masa Kerja			Pendidikan		Tempat / tgl lahir	Jumlah Jam	Mata Pelajaran
			Mulai	Selesai		Tahun	Bulan	Jumlah	Tahun Ijazah	Tingkatan			
1.	Ahmad Haini, SPd.	550740643200012	01/07/2000		Guru Olah raga	14	8	Penjasas	2002	SI	Jember, 18-02-1962	-	Agama
2.	Eko Suello, SPd.		01/10/2007		Guru IPA	7	8	IPA	1990	Sarjana	Lumajang, 24-03-1985	-	IPA
3.	Ayun Dwi Nurhasana, SPd.		01-10-2008		Guru BIN	1	7	BIN	1987	Sarjana	Probolinggo, 11-07-1990	-	BIN
4.	Winda Setyaningtyas, SPd.	405676666720013	06/07/1905		Guru BIG	1	0	BIG	2014	Sarjana	Jember, 24-07-1988	-	BIG
5.	Ari Budilandi, SPd.		01/04/2014		GTT	1	0	Olahraga	2014	Sarjana	Jember, 01-01-1987	-	M T K
6.	Agus Kurnianto	848756657200012	11/07/2003		GTT	21	0	TI	2015	Sarjana	Jember, 16-05-1978	-	Prakarya
7.	Lida Nurafni	8145747450300013	31/07/1991		Kopis	24	0	IPS	1988	SMA	Bondowoso, 13-06-1969	-	--
8.	Lisa Paulo Pesty	8033758660300013	07/07/2000		Ketersagaan	14	0	TB	1999	SMK	Jember, 01-07-1980	-	--
9.	Maria Qori Widya R.		07/01/2007		Pustakawan	7	0	TI	2008	DI	Bangkalan, 10-02-1988	-	--
10.	Rizqi Febriansari		01/07/1905		Kurikulum	5	0	TI	2015	Sarjana	Jember, 17-02-1991	-	--
11.	Widia Lestari		01/07/2010		Pustakawan	4	0	BIG	2015	Sarjana	Bitar, 06-02-1960	-	BIG
12.	Vita Prayudi, S.Si.		01/04/2011			4	0	MIPA			Jember, 03-11-1983	-	--
13.	Aliffani Novianti		01/07/2015		Kopis	-	5	SMA	2009	SMA	Jember, 20-11-1990	-	--
14.	Moh. Arifin	9935745649200002	08/07/1987		SATPAM	27	0	5T Mesin	1985	SMP	Jember, 03 Juni 1967	-	SATPAM
15.	Moh. Musen	6146748651200013	01/03/1993		Pramu Kebersihan	24	0	Mesin	1990	SMK	Jember, 14 Agustus 1970	-	SATPAM
16.	Moh. Ja'far	7351738641200000	01/07/2002		Pramu Kebersihan	12	0	SMK	1980	SMK	Jember, 19-10-1960	-	TB
17.	Suyitno	4355750652200033	01/08/1999		Pemaga sekolah	16	1	Mesin	1994	SMK	Jember, 23-10-1972	-	--
18.	M. Riyono	--	01/02/2015		Pramu Kebersihan	1	1	Mesin		SMP	Jember, 01-07-1990	-	--
27.	Heru Eko Purwanto	2996759662200012	01/04/2015		SATPAM	0	4			SMK	Banyuwangi, 04-06-1981	-	--



PROFIL SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 10 JEMBER
2. NPSN : 20523883
3. Alamat (Jalan/Kec/No. Telp) : Jl. Nusa Indah no. 25 Kelurahan Jember Lor
Kecamatan Patrang Kab. Jember
No. Telp : 0331 - 485223
4. Koordinat : -7.253496, 112.758179 dan
Spn = 3.013086, 5.410767 dan t = h & z = 8>
5. Nama Yayasan (bagi swasta) :
6. Nama Kepala Sekolah : H. Didiek Triyanto R., S.Pd, M.Pd
No. Telp / HP : 081217305919
7. Kategori Sekolah : Reguler
8. Tahun Beroperasi : 1991
9. Kepemilikan Tanah / Bangunan : Milik Pemerintah/Yayasan/Sekolah/Pribadi/Menyewa/
Menumpang *)
- a. Luas Tanah / Status : 9290 m2 SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual-beli/Hibah *)
Sertakan fotocopy-nya
- b. Luas Bangunan : 4669 m2

10. Data Siswa dalam 3 tahun terakhir :

Th. Pelajaran	Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII + VIII + IX)	
		Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Siswa	Rombel
2013/2014	308	288	8	272	8	272	8	832	24
2014/2015	295	287	8	294	8	272	8	853	24
2015/2016	461	318	8	288	8	287	8	893	24

11. a. Data Ruang kelas

	Jumlah ruang Kelas Asli (d)				Jumlah Ruang lainnya yang Digunakan Ruang kelas (e)	Jumlah Ruang yang Digunakan untuk Ruang Kelas f = d + e
	Ukuran 7 X 9 M (a)	Ukuran > 63 M (b)	Ukuran < 63 M (c)	Jumlah d = a + b + c		
Ruang Kelas	-	8	16	24 Kelas	Jumlah : Ruang Yaitu	24 Ruang

b. Data Ruang Belajar Lainnya

Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran
1. Perpustakaan	1	15 X 10	6. Ruang Kesenian	1	8 X 8
2. Lab IPA	2	9 X 15 dan 15 X 10	7. Ruang Ketrampilan	3	9 X 47
3. Lab Komputer	1	8 X 10	8. Ruang serbaguna	1	8 X 13
4. Lab Bahasa	1	9 X 15	9. Ruang Ibadah	1	10 X 12
5. Ruang UKS	1	5 X 7	10. Ruang Kantin	1	7 X 8

c. Data Tenaga Pendidik

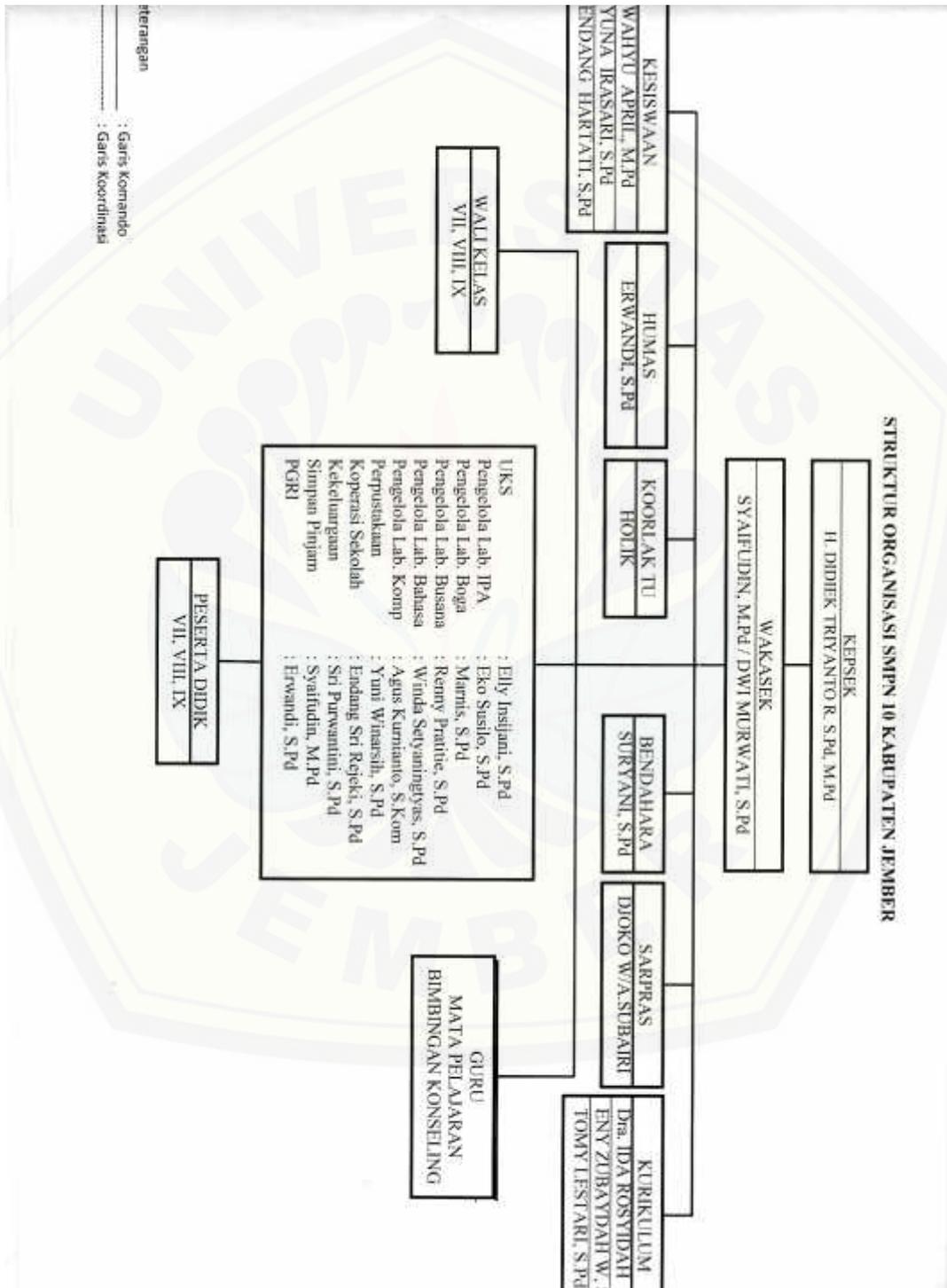
Jumlah Guru / Staf	Bagi Guru SMP	Bagi SMP Swasta	Keterangan
Guru Tetap (PNS/Yayasan)	36		
Guru Tidak Tetap/Guru Bantu	7		
Guru PNS Dipekerjakan (DPK)	-		
Staf Tata Usaha	7		

Mengetahui,
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK

Jember, 7 Desember 2015
Kepala Sekolah,



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH



DATA REKAPITULASI UJIAN NASIONAL SMPN 10
JEMBER

DATA REKAPITULASI HASIL UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 10 JEMBER

TAHUN	MATA PELAJARAN				Rata-rata UN	Keterangan
	Bhs Indonesia	Bhs Inggris	Matematika	IPA		
2010-2011	7,63	8,5	8,18	8,43	8,19	5 type soal
2011-2012	8,89	8,02	8,88	8,44	8,43	5 type soal
2012-2013	7,77	5,54	6,73	7,58	6,91	20 type soal
2013-2014	7,4	7,24	6,49	7,59	7,18	20 type soal
2014-2015	83,44	75,74	77,6	79,33	7,93	

**DATA REKAPITULASI SMP NEGERI KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Rekapitulasi Kelulusan SMP NEGERI Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

No	SUBRA	Tahun Pelajaran	Kelulusan				Tahun Pelajaran	Kelulusan			
			Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Persentase Kelulusan		Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Persentase Kelulusan
1	SMP Negeri 2 Jember	2005/2006	201	201	0%	100%	2010/2011	193	193	0%	100%
		2006/2007	218	218	0%	100%	2011/2012	195	195	0%	100%
		2007/2008	192	192	0%	100%	2012/2013	173	173	0%	100%
		2008/2009	187	187	0%	100%	2013/2014	199	199	0%	100%
		2009/2010	182	182	0%	100%	2014/2015	212	212	0%	100%
2	SMP Negeri 4 Jember	2005/2006	147	146	1	99,32%	2010/2011	198	198	0%	100%
		2006/2007	136	135	1	99,26%	2011/2012	194	194	0%	100%
		2007/2008	199	199	0%	100%	2012/2013	203	203	0%	100%
		2008/2009	184	184	0%	100%	2013/2014	217	217	0%	100%
		2009/2010	186	186	0%	100%	2014/2015	228	228	0%	100%
3	SMP Negeri 7 Jember	2005/2006	175	174	1	99,43%	2010/2011	238	237	1	99,13%
		2006/2007	192	191	1	99,48%	2011/2012	291	291	0%	100%
		2007/2008	177	176	1	99,44%	2012/2013	281	281	0%	100%
		2008/2009	195	195	0%	100%	2013/2014	304	304	0%	100%
		2009/2010	214	213	1	99,53%	2014/2015	337	337	0%	100%
4	SMP Negeri 10 Jember	2005/2006	266	264	2	99,25%	2010/2011	261	261	0%	100%
		2006/2007	276	275	1	99,64%	2011/2012	281	281	0%	100%
		2007/2008	241	240	1	99,59%	2012/2013	289	289	0%	100%
		2008/2009	238	238	0%	100%	2013/2014	273	273	0%	100%
		2009/2010	253	252	1	99,60%	2014/2015	272	272	0%	100%
5	SMP Negeri 13 Jember	2005/2006					2010/2011	64	64	0%	100%
		2006/2007					2011/2012	112	112	0%	100%
		2007/2008					2012/2013	119	119	0%	100%
		2008/2009					2013/2014	113	113	0%	100%
		2009/2010					2014/2015	123	123	0%	100%

Sumber Data dari DISPENKIN JEMBER, 2013



DATA JUMLAH GURU YANG DAPAT SERTIFIKASI DAN BELUM SERTIFIKASI DI SMPN NEGERI WILAYAH KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

**JUMLAH GURU YANG DAPAT SERTIFIKASI DAN YANG BELUM SERTIFIKASI
DI SMP NEGERI WILAYAH KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	YANG DAPAT SERTIFIKASI										YANG BELUM SERTIFIKASI	
			Th. 2011		Th. 2012		Th. 2013		Th. 2014		Th. 2015			
			Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi	Jumlah Guru	Yang Sertifikasi
1	SMPN 2	Jalan P. B. Sudirman Jember	19	16	19	16	19	19	19	19	19	19	19	0
2	SMPN 4	Jl. Nusa Indah Jember	28	20	28	24	28	26	28	28	28	28	28	0
3	SMPN 7	Jl. Cendria- Wash Jember	28	21	28	23	28	23	28	28	28	27	27	0
4	SMPN 10	Jl. Nusa Indah Jember	37	29	37	29	37	32	37	34	37	34	34	3
5	SMPN 13	Jl. Rembangun Jember	12	7	12	9	12	11	12	12	12	12	12	0

Sumber Data dari DISPENSIK, JEMBER, 2015

